

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan.

Menganalisa tentang dunia ketenagakerjaan berarti kita akan dihadapkan dengan berbagai macam konflik masalah yang berlapis dalam kehidupan kaum buruh. Perjuangan kaum buruh untuk memperbaiki harkat, martabat dan derajat di negeri sendiri masih panjang. Gaung tuntutan perbaikan upah dan keadilan sudah disuarakan dari berbagai pelosok negeri. Ironisnya pada saat memperjuangkan hak dan keadilan dari Pemerintah banyak korban berjatuh dari pihak kaum buruh dan keluarganya yang berujung dengan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) atau harus berurusan dengan hukum.

Melihat kenyataan yang disampaikan oleh berbagai media lokal dan Nasional tentang keberadaan ribuan tenaga kerja asing (TKA) yang masuk dan bekerja di berbagai proyek bersekala besar telah memicu kerisauan dan kemarahan rakyat Indonesia. Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra, Mantan Menko Ekonomi, Keuangan dan Industri, Ginanjar Kartasmita dan Pengamat politik Muslim Arbi angkat bicara dan mengemukakan penilaiannya yang senada dalam kekhawatirannya dengan kedatangan ribuan TKA tsb bahwa hal tersebut merupakan kesalahan dan mengingatkan Pemerintah untuk berhati-hati dalam membuat kebijakan.

Sementara disisi lain persediaan tenaga kerja Indonesia masih melimpah sehingga untuk menanggulangi masalah pengangguran tersebut pemerintah melalui BNP2TKI berperan aktif memberangkatkan tenaga kerja Indonesia ke berbagai Negara lain seperti Arab Saudi, Malaysia, Singapore dan Negara Asing lainnya sebagai tujuan untuk penghidupan baru bagi TKI, sebagai upaya untuk perbaikan tingkat sosial ekonominya, walaupun resiko yang akan dihadapinya belum bisa diprediksi akan lebih baik atau malah lebih buruk. Menurut data BNP2TKI pada tahun 2014 terdapat sekitar 5 – 15% dari 200 – 400 ribu orang TKI bermasalah yang pulang ke Indonesia setiap tahunnya. Masalah-masalah

tersebut diantaranya berkaitan dengan legalitas keberangkatan, menjadi korban tindakan kekerasan/ konflik dengan majikan berupa kekerasan fisik, penganiayaan seksual, masalah gaji yang tidak dibayar dan sebagainya. Data TKI yang dipulangkan selama tahun 2014 dari Arab Saudi sebanyak 20.379 orang, sedangkan dari Malaysia sebanyak 26.428 orang disusul dari negara Korea Selatan sebesar 4.000 orang.

.¹ Pelemahan ekonomi Indonesia adalah realita yang harus kita hadapi saat ini. Walaupun melemahnya ekonomi adalah akibat dari faktor luar dan dalam dari dinamika ekonomi Indonesia, efek terhadap rakyat tanpa disadari terus terasa. Efek-efek ini termasuk peningkatan tingkat kurs rupiah pada mata uang dunia lainnya, fluktuasi harga pangan, hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan, terutama bagi masyarakat kelas menengah kebawah demi menjaga roda perusahaan terus berjalan. Diantara isu ekonomi melemah ini, masyarakat Indonesia dikagetkan dengan datangnya ribuan tenaga asing dari negara tetangga. Tingginya arus tenaga asing yang datang dari negara tetangga ke Indonesia ini, terutama China, tidak diantisipasi oleh masyarakat. Walaupun angkanya masih simpang siur, sekurang-kurangnya terdapat 5.000 orang buruh (Tempo, 31 Agustus 2015) yang kini baru tercatat di Indonesia.

Kondisi tenaga kerja Indonesia saat ini masih memiliki tingkat populasi yang cukup signifikan menganggur, menurut data BPS, jumlah pengangguran di Indonesia per Februari 2015 adalah 7,45 juta jiwa dari 240 juta populasi dan 129 juta angkatan kerja. Selain itu disebut juga bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) didominasi penduduk berpendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar 9,05% disusul jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) 8,17%, dan Diploma I/II/II sebesar 7,49%.

¹ Aulia Natasya Irfani Ampri, *Bombardir Masuknya Tenaga Kerja Asing :Apakah kita siap?*-<http://bemfeui.com/offical/bombardir-masuknya-tenaga-kerja-asing-ke-indonesia-apakah-kita-siap/>

Indonesia masih memiliki masalah dalam ketimpangan kompetensi. Jika dibandingkan secara kasar, pekerja lulusan Sekolah Dasar (SD) meliputi 45,13% dari populasi, sedangkan tenaga kerja ditingkat Sarjana ke atas hanya 8,29%. Ketimpangan kompetensi pekerja ini membuat tenaga kerja sangat rentan dengan isu – isu dan membutuhkan proteksi dan memerlukan kesempatan kerja yang lebih luas.

Kabar bahwa adanya kedatangan tenaga kerja dari China ke Indonesia telah dibenarkan oleh Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri. Kementrian Ketenagakerjaan mengakui bahwa mereka telah menerbitkan setidaknya 41 ribu Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) sejak Januari 2014 hingga Mei 2015. Walaupun Menteri Hanif menegaskan bahwa secara keseluruhan jumlah pekerja Tiongkok ini kurang dari 0,1 persen dari jumlah total buruh lokal Indonesia, kedatangan buruh impor ini mengancam terutama buruh kelas bawah. Pekerja-pekerja Tiongkok ini biasa bekerja di proyek investasi yang memang bekerjasama dengan pihak dari negara Panda, seperti proyek PLTU Celukan Bawang di Buleleng, Bali yang diadakan oleh China Huadian Power Plant, China Huadian Engineering, Co. Ltd, PT CT 17, mitra lokal PT General Energy Bali dan pembangunan pabrik semen PT Cemindo Gemilang di Bayah, Banten.

Pelanggaran karena penegakan hukum yang kurang baik masih terjadi di Indonesia dan bukanlah hal yang asing di ranah kita. Di proyek-proyek investasi China tersebut saja banyak diantara mereka yang mengakui masuk dari cara calo ilegal dan memainkan peraturan yang telah dibuat oleh Kemennaker. Lebih dari itu, perusahaan yang berinvestasi dari China ini juga banyak yang membawa paket lengkap langsung dari negeri China, termasuk peralatan proyek dan pekerja dari level top manager, operator, hingga pekerja kasar tidak terdidik seperti buruh. Pekerja lokal seolah kurang dilibatkan dengan alasan keefektifan komunikasi dan dianggap ada hanya untuk memenuhi syarat investasi di Indonesia.

Regulasi proteksi pekerja Indonesia saat ini, Indonesia terus membuka keran investasi untuk mengatasi perlambatan ekonomi. Menteri Ketenagakerjaan RI M. Hanif Dhakiri telah menyampaikan bahwa berbagai deregulasi dan usaha sengaja dibuat agar iklim berinvestasi di Indonesia lebih kondusif. Indonesia telah lebih mendetailkan prasyarat tenaga kerja asing yang ingin bekerja dengan mengeluarkan Permenaker no. 16 tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Dalam Permenaker ini, dicantumkan berbagai regulasi yang mengetatkan dan membebaskan penggunaan TKA. Pasal 3 Permenaker no. 16 tahun 2015 mencantumkan bahwa pemberi kerja yang mempekerjakan satu orang TKA wajib memberi kerja sekurang-kurangnya 10 tenaga kerja Indonesia. Selain itu tercantum pula dalam pasal 36 ayat 1 Permenaker no. 16 tahun 2015 bahwa TKA yang dipekerjakan di Indonesia wajib memiliki pendidikan yang sesuai dengan jabatan yang dimiliki dan memiliki sertifikat kompetensi atau pengalaman kerja di bidang tersebut se-kurang-kurangnya lima tahun. Dengan kata lain, TKA harus benar-benar kompeten di bidang tersebut agar dapat bekerja di Indonesia. Setiap TKA juga harus memiliki seorang pendamping TKI untuk keperluan alih bahasa dan transfer teknologi. Namun kebijakan permenaker itu telah direvisi di Permenaker No :35/2015, Perubahan atas peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 16 tahun 2015 tentang tata cara penggunaan TKA.

Hal yang disayangkan dari Perubahan atau revisi Permenaker ini adalah penghapusan syarat berbahasa Indonesia bagi TKA yang ingin bekerja di Indonesia. Bahasa adalah identitas bangsa Indonesia dan merupakan salah satu pembatas yang paling kuat untuk mencegah *inflow* tenaga kerja asing ke Indonesia. Penghilangan *barrier* ini tentunya akan banyak berpengaruh bagi dinamika tenaga kerja di Indonesia.

Beberapa liputan tentang keberadaan tenaga kerja asing asal China di Indonesia dari media lokal dan Nasional: ²Banten diprediksi mengalami

² <http://bisnis.liputan6.com/read/2315208/banten-bakal-kebanjiran-tenaga-kerja-asing-saat-mea>

kebanjiran tenaga kerja asing (TKA) sebanyak 25 ribu orang yang mulai masuk sejak akhir 2015-2016, dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sukabumi mencatat jumlah pekerja asing mencapai 664 orang, dari jumlah itu, baru sebanyak 256 pekerja asing telah memperpanjang izin tinggal dan bekerja. Sisanya belum melakukan pengajuan perpanjangan izin, TKA yang belum memperpanjang izin bekerja dan izin tinggal mencapai 408 orang, berasal dari berbagai negara seperti China, Korea Selatan, Taiwan, Thailand dan Malaysia. “Hampir 50 persennya TKA berasal dari Cina. Mereka mayoritas berasal dari garmen,” kata Kepala Seksi Penyediaan dan Penempatan Tenaga Kerja dalam Negeri Disnakertrans Kabupaten Sukabumi Tatang Arifin.

Mereka, kata Tatang, kebanyakan TKA asal Cina itu dipekerjakan di jabatan menengah, seperti ahli teknisi. Meskipun TKA asal China mendominasi di Kabupaten Sukabumi namun masa bekerja TKA asal China itu cukup singkat. Selain itu, masa kerjanya tidak bisa diperpanjang lagi. “Untuk TKA asal China, Taiwan, dan India masa kerjanya dibatasi hanya enam bulan,” tuturnya. (sule/win)

³Selama Januari hingga pekan ke-3 Juli 2016, Direktorat Jenderal Imigrasi telah memproses 5.044 kasus terkait tindakan administrasi keimigrasian (TAK). Dari jumlah itu , 2.856 orang asing berhasil dideportasi oleh pihak Imigrasi . Sedangkan dari 10 negara, warga negara China merupakan terbanyak yang melakukan pelanggaran TAK yaitu 1180 orang. Kemudian diikuti Afganistan 411 orang, Bangladesh 172 orang, Filipina 151 orang dan Irak 127 orang.

Dalam menghadapi perdagangan bebas, Pengawas ketenagakerjaan akan tetap mengacu kepada regulasi yang mengatur tentang syarat dan kualifikasi mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. Jika nanti ditemukan di lapangan bahwa TKA yang datang tidak memiliki izin, maka tidak akan segan untuk menindak pelanggaran tersebut," kata Kepala Seksi (Kasie) Norma Kerja, Disnakertrans Provinsi Banten, Erwin Syafrudin, Jumat (11/9/2015).

³ <http://bisnis.liputan6.com/read/2562359/ditjen-imigrasi-harus-bisa-cegah-serbuan-pekerja-tiongkok-ke-ri>

Langkah tersebut dilakukan mengingat Banten juga memiliki angka pengangguran mencapai 480 ribu jiwa. Karena itu, tenaga kerja lokal asal Banten harus tetap dilindungi agar tidak terjadi ledakan pengangguran. "Hal ini dilakukan selain untuk menegakkan aturan ketenagakerjaan, juga dilakukan guna melindungi kesempatan kerja bagi para tenaga kerja lokal supaya mereka tidak kehilangan kesempatan untuk bekerja," ujar Erwin. Dirinya pun meminta agar pemerintah pusat bisa lebih teliti dalam menerbitkan tinggal atau izin bekerja bagi tenaga kerja asing. "Kepada para pengusaha yang hendak mempekerjakan Tenaga Kerja Asing agar patuh dan taat kepada peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan seperti UU No. 13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan, maupun peraturan turunan lainnya," tegas Erwin.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Disnakertrans Provinsi Banten, sebanyak 25.200 orang TKA sedang mengurus izin kerja. Izin itu hanya berlaku selama satu tahun. Sehingga TKA di Banten akan mencapai angka 35 ribu jiwa. Dari 13 ribu perusahaan yang ada di Banten, tenaga kerja lokal berjumlah 1,3 juta jiwa. Hingga akhir agustus 2015, tercatat sebanyak 10 ribu jiwa TKA bekerja di Banten. Sedangkan berdasarkan data dari Kanwil Kumham Provinsi Banten, Dirjen Imigrasi mencatat jumlah tenaga kerja asing terbanyak berasal dari China sebanyak 2.809 orang, lalu Korsel 2.188, Jepang 48 orang, Taiwan 454 orang, Amerika 278 dan 2.000 lainnya dari beragam negara. (Yandhi D/Ahm).

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk ke empat terbesar didunia, setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Sedangkan negara kelima yang memiliki penduduk terbesar adalah Jepang. Indonesia dengan jumlah penduduk 237.641.326 jiwa berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 menurut data Badan Pusat Statistik Indonesia. Tentu saja hal ini menyebabkan Indonesia memiliki sumber daya manusia atau tenaga kerja yang melimpah, yang bisa disalurkan untuk mempercepat proses pembangunan Indonesia. Sumber daya manusia yang melimpah dan didukung oleh sumber daya alam yang juga melimpah merupakan modal yang sangat besar bagi bangsa Indonesia untuk mengejar ketertinggalannya

dari negara lain yang lebih maju dan makmur. Hal ini bisa terwujud kalau pengelolaan SDM dan SDA tadi terlaksana dengan baik, terjadi perimbangan antara pendidikan/skill yang dimiliki oleh tenaga kerja dan ketersediaan lapangan kerja.

Masalah akan timbul, apabila terdapat kesenjangan antara jumlah tenaga kerja yang besar dengan minimnya ketersediaan lapangan kerja yang ada. Dengan kata lain lapangan kerja yang ada tidak mampu menampung (mempekerjakan) tenaga kerja yang ada, lebih-lebih tenaga kerja yang tidak terampil atau berpendidikan. Masalah ini akan menyebabkan semakin meningkatnya tingkat pengangguran sehingga jumlah penduduk miskin juga semakin besar dan memiliki efek-efek negatif yang lain pula.

Upaya pemerintah untuk mempercepat lajunya perekonomian negara berupaya mencari curahan dana dari investor asing dan hutang luar negeri yang bertujuan untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak selalu berbuah manis, salah satu faktor penyebab kesenjangan sosial ekonomi di negeri ini diduga bahwa negara ini masih harus menggantungkan diri pada investor asing dan hutang luar negeri.

Berdasarkan data yang penulis himpun dari detikfinance yang ditulis oleh Wahy Daniel pada Kamis, 21 April 2016 08:06 WIB, daftar 10 Pemberi Utang Terbesar ke Pemerintah RI.⁴ Saat ini, Indonesia masih memiliki pinjaman luar negeri per Maret 2016, utang luar negeri pemerintah Indonesia (baik bilateral maupun multilateral) tercatat Rp 745,82 triliun, turun dari akhir Februari 2016 yang sebesar Rp 753,47 triliun. Secara bilateral, Jepang, Prancis, dan Jerman masih menjadi kreditur terbesar utang Indonesia. Sementara secara multilateral, Indonesia masih meminjam dari Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB), dan Bank Pembangunan Islam (IDB).

⁴ Sumber: <http://us.detikfinance.com/read/2010/05/15/170612/1357641/4/utang-ri-pada-3-kreditur-besar-capai-us-4857-miliar>

Berikut adalah pemberi pinjaman bilateral dan multilateral terbesar buat Indonesia, seperti dikutip dari data Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Kamis (21/4/2016).

1. Bank Dunia

Bank Dunia saat ini menjadi pemberi hutang luar negeri terbesar ke pemerintah Indonesia. Jumlahnya hingga akhir Maret 2016 mencapai Rp 221,43 triliun, turun dari bulan sebelumnya Rp 222,69 triliun. Utang Indonesia ke Bank Dunia mencapai 29,7% dari total utang luar negeri pemerintah.

2. Jepang

Negeri Matahari Terbit menempati posisi sebagai kreditur terbesar nomor 2 ke pemerintah Indonesia. Per Maret 2016, utang pemerintah Indonesia ke Jepang mencapai Rp 220,04 triliun, turun dari bulan sebelumnya Rp 222,05 triliun.

3. Bank Pembangunan Asia (ADB)

Utang dari ADB per Maret 2016 adalah Rp 121,01 triliun, turun dari bulan sebelumnya Rp 122,85 triliun. Jumlah ini adalah 16,2% dari total utang luar negeri pemerintah pusat. Utang tersebut mencapai 29,5% dari total pinjaman.

4. Prancis

Sampai Maret 2016, utang Indonesia ke Prancis mencapai Rp 26,38 triliun. Naik dari bulan sebelumnya Rp 25,98 triliun. Jumlah tersebut adalah 3,5% dari total utang luar negeri pemerintah pusat.

5. Jerman

Hingga Maret 2016, utang pemerintah Indonesia ke Jerman mencapai Rp 21,82 triliun, naik tipis dari bulan sebelumnya Rp 21,55 triliun. Ini adalah 2,9% dari total utang luar negeri pemerintah pusat.

6. Islamic Development Bank (IDB)

Per Maret 2016, utang pemerintah Indonesia ke IDB mencapai Rp 8,75 triliun, naik dari bulan sebelumnya Rp 8,49 triliun. Persentasenya adalah 1,1% dari total utang luar negeri Indonesia.

Selain 6 besar ini, Indonesia juga memiliki utang luar negeri ke negara ini yaitu: Korea Selatan Rp 19,57 triliun, China Rp 12,03 triliun, Amerika Serikat (AS) Rp 10,87 triliun, Australia Rp 7,92 triliun, Spanyol Rp 3,89 triliun, Rusia Rp 3,56 triliun, Inggris Rp 3,39 triliun, (wdl/ang).

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang menjadi latar belakang sehingga terjadinya peningkatan jumlah tenaga kerja asing khususnya yang berasal dari China ke Indonesia?
2. Apa saja yang menjadi dampak/pengaruh dari masuknya ribuan tenaga kerja asing ke Indonesia terhadap tenaga kerja Indonesia?
3. Apa saja peranan Pemerintah untuk melindungi pekerja lokal dari serbuan buruh asing asal China?

1. Pembatasan Masalah.

Mengingat luasnya kajian penelitian ini, maka penulis membatasi masalah yang terfokus pada pembahasan mengenai masuknya ribuan Tenaga Kerja Asing asal China dan pengaruhnya terhadap tenaga kerja Indonesia .

2. Rumusan Masalah.

Berdasarkan uraian yang telah saya sampaikan di atas, maka penulis merumuskan masalah dan menyoroti “Sejauh mana pengaruh dari meningkatnya jumlah pekerja asal China bagi kehidupan buruh/tenaga kerja Indonesia?”.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian:

1. Tujuan Penelitian:

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti, mengeksplorasi, menganalisa serta mendeskripsikan:

1. Faktor – faktor yang menjadi pendorong peningkatan jumlah masuknya tenaga kerja asing asal China di Indonesia.
2. Untuk menganalisis pengaruh masuknya tenaga kerja asing asal China terhadap kondisi buruh lokal Indonesia atas diberlakukannya revisi Permenaker No:16/2015 dan Regulasi Baru yang dikeluarkan oleh Kantor Direktorat Jendral Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM yang memberikan kemudahan bagi orang asing dari warganegara tertentu untuk

masuk dan keluar wilayah republik indonesia yang dilaksanakan dalam bentuk pembebasan dari kewajiban memiliki visa kunjungan.

3. Untuk mencermati peranan pemerintah dalam melaksanakan upaya-upaya penegakkan hukum perlindungan kaum buruh/pekerja Indonesia dari meningkatnya jumlah masuknya tenaga kerja kerja asing yang bekerja di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian.

⁵ Dilihat dari kegunaannya, penelitian ini bersifat penelitian murni, **Neuman** (2007, p.11) berpendapat *“basic researces focus om refutting or supporting theories that explain how the social word operates, what makes things happen, why social relations are a certain way, and why sociate change”*. Sementara itu **Prasetyo** dan **Jannah** menjelaskan bahwa penelitian murni mencakup penelitian yang dilakukan dalam kerangka akademis dan lebih banyak ditujukan bagi pemenuhan keinginan atau kebutuhan peneliti sehingga peneliti memiliki kebebasan untuk menentukan permasalahan apa yang akan diteliti (**Prasetyo & Jannah, 2006, p.38**).

Secara akademis penelitian ini dapat berguna:

2.1. Bagi Program Studi Hubungan Internasional dapat memberikan kajian dan analisis mendalam tentang masuknya tenaga kerja asing (TKA) asing asal China serta pengaruhnya terhadap tenaga kerja lokal menjelang pemberlakuan MEA 2016.

2.2 Bagi Masyarakat Menyediakan referensi, informasi, dan wawasan mengenai isu-isu sosial dan politik yang tengah terjadi sehingga masyarakat dapat lebih berpikir kritis dan analistis terhadap dampak-dampak dari suatu perubahan kebijakan yang akan dihadapi.

2.3 Bagi Penulis Sebagai sarana pembelajaran akademis serta melengkapi tugas akhir sebagai syarat kelulusan, sebagai produsen ilmu pengetahuan untuk penelitian selanjutnya.

⁵ Cresti Wastikarini, FISIP-UI-2012, skripsi, Pengenaan Retribusi Pengenaan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Bekasi, hal-31.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi data dan dapat memberikan gambaran serta masukan yang bermanfaat kepada Pemerintah baik di pusat maupun di daerah serta seluruh lapisan masyarakat sebagai sosialisasi dan kontribusi pengetahuan tentang analisis dari latar belakang masuknya ribuan buruh asing di Indonesia serta pengaruhnya bagi rakyat Indonesia, khususnya buruh, pekerja dan pencari kerja.

D. Kerangka Teoritis dan Hipotesis.

1. Kerangka Teoritis

Pada pembahasan ini, penulis akan mencantumkan teori-teori dari para ahli yang berkaitan erat dengan hal-hal yang menyangkut skripsi penulis, sehingga dapat relevan antara penelitian yang dikaji dengan teori-teori yang sudah ada. Kerangka-kerangka teoritis yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini meliputi teoritis Ilmu Hubungan Internasional, teori perlindungan, teoritis tenaga kerja/buruh, teoritis tenaga kerja/buruh local, teoritis tenaga kerja/buruh asing, teoritis hak azasi manusia, teori kebijakan dan investasi asing *Foreign Direct Investment (FDI)*.

⁶1.1. Teori Hubungan Internasional dan Kegunaannya.

Secara umum teori dapat diartikan sebagai suatu pandangan atau persepsi tentang apa yang terjadi, menjelaskan mengapa hal tersebut terjadi dan meramalkan kemungkinan hal tersebut terjadi lagi di masa yang akan datang. Secara lebih spesifik, teori merupakan generalisasi dari fenomena-fenomena yang terjadi yang di dalamnya terdapat konsep-konsep. Suatu teori juga harus didukung oleh bukti-bukti yang sistematis. Dalam mempelajari Hubungan Internasional pun diperlukan teori untuk menjelaskan mengapa suatu fenomena di dunia terjadi. Maka teori Hubungan Internasional merupakan gambaran-gambaran sistematis mengenai terjadinya suatu fenomena dan apa yang menyebabkan fenomena tersebut muncul serta bagaimana hal tersebut terjadi dan kemungkinan akan

⁶ <https://riszinwords.wordpress.com/2013/02/15/teori-hubungan-internasional-i/>

terulangnya kembali fenomena tersebut berdasarkan fakta-fakta atau bukti-bukti yang telah dianalisis.

Namun dunia internasional bukanlah suatu fakta yang statis. Sikap suatu negara dalam dunia internasional dan hubungan-hubungan yang terjadi antar negara merupakan suatu fenomena yang kompleks dan tidak dapat diprediksi secara pasti. Maka dalam menjelaskan hal tersebut tidak ada suatu teori yang benar-benar mampu menjelaskan secara sempurna tentang segala yang terjadi dalam hubungan internasional. Teori-teori Hubungan Internasional cenderung memiliki jangkauan dan daya eksplanasi yang terbatas. Sehingga dalam menggambarkan fenomena hubungan internasional yang ada, terdapat dua pendekatan yang dipakai oleh ilmuan hubungan internasional, yakni **Middle-range Theory** dan **Grand Theory**. Pendukung teori **Middle-range**, antara lain **Joseph Nye, J. David Singer**, berpendapat bahwa teori hubungan internasional harus *relevan* dengan kebutuhan membuat kebijaksanaan.

Dalam dunia internasional yang kompleks maka dibutuhkan banyak *variabel independen* sehingga dapat menganalisis kemungkinan-kemungkinan yang ada dalam menetapkan mengapa suatu fenomena terjadi mengingat hubungan internasional menyangkut banyak unit yang saling berhubungan dan kompleks, serta tidak menutup kemungkinan menjadi sesuatu yang *unpredictable*. Sedangkan dalam **Grand Theory**, fenomena-fenomena hubungan internasional digeneralisir sedemikian rupa sehingga dipeoleh penjelasan yang sederhana. Penyederhanaan ini dilakukan dengan menekankan sifat parsimoni, yakni dengan hanya memuat lebih sedikit variabel independen. Teori ini didukung oleh **Hans J. Morgenthau**.

Terdapat beberapa teori yang sering dipakai dalam menganalisis hubungan internasional, yakni *Realisme*, yang cenderung hanya menggunakan pemikiran yang sempit mengenai dunia internasional dan teori-teori lain yang berkembang sesuai dinamika hubungan internasional, dan menjadi kritik terhadap *Realisme*,

seperti *Liberalisme* dan *Konstruktivisme*. Teori-teori tersebut yang muncul tergantung paradigma seperti apa yang digunakan.

Realisme

Realisme termasuk dalam *Grand Theory*. Teori ini dikemukakan oleh **Hans J. Morgenthau**. Dalam studinya mengenai hubungan internasional, **Morgenthau** menyederhanakan fakta-fakta yang ada mengenai perilaku suatu negara dalam dunia internasional. Variabel yang dianggap paling mampu menjelaskan perilaku internasional tersebut adalah Kekuasaan (*power*). Bahwa dalam pandangan *realis*, negara-negara di dunia melakukan politik internasional untuk mendapatkan kekuasaan.[5] Dunia internasional adalah arena *struggle of power*. National interest suatu negara adalah hal yang ingin diperjuangkan. *National interest* dapat berupa power (kekuasaan), *security* (pertahanan keamanan), dsb. Kaum *realis* menganggap dunia internasional adalah *anarkhis* sehingga setiap negara harus mampu mempertahankan diri dan kepentingannya agar tidak tertindas oleh negara lain. Untuk itu negara-negara di dunia memerlukan instrumen yang menjadi kekuatan utama agar dapat bersaing ataupun mempertahankan diri, yakni kekuatan militer dan ekonomi. Dua hal tersebut merupakan akumulasi power yang harus dimiliki atau direbut dari negara lain. Maka politik yang dijalankan oleh seorang pemimpin negara menjelaskan bagaimana suatu kekuasaan itu dipergunakan. Politik dapat mencakup *social process* (proses sosial), *rivalry and corporation* (persaingan dan kerja sama), *making of decision* (pembuatan kebijakan), serta *binding in a group* (terikat dalam suatu kelompok).[6] Karena itu, Politik menjadi perilaku utama dalam memahami suatu negara memerlukan suatu kebijakan internasional.

Kelemahan teori *Realisme* adalah hanya memandang dunia secara sempit, yakni bahwa dunia internasional adalah *anarkhis*, dan negara adalah aktor utama dalam hubungan internasional, penentu segala macam kebijakan yang berlaku baik untuk wilayahnya (rakyat dan *teritorinya*) ataupun sikap negara tersebut terhadap negara lain. *Realisme* tidak memperhitungkan dinamika hubungan internasional yang setiap saat dapat berubah dan tidak selamanya menjadi arena

yang perlu untuk dikhawatirkan, adakalanya dunia internasional menginginkan perdamaian.

Liberalisme

Teori ini lahir sebagai bentuk kritik terhadap teori *Realisme*, menyusul berakhirnya Perang Dunia II. Pasca Perang Dunia II usai, konsentrasi politik dunia telah bergeser pada orientasi ekonomi, di mana hubungan internasional diarahkan pada kerjasama internasional untuk membangun kembali dunia yang hancur akibat perang dan fokus menciptakan tatanan dunia yang damai dan mewujudkan stabilitas internasional.

Proporsi teoritik paham ini adalah bahwa kalkulasi ekonomi maupun politik, yakni kemakmuran dan keamanan bersama adalah lebih penting daripada kalkulasi "*power*". Liberalisme memandang bahwa negara bukanlah satu-satunya unit analisis yang utama dalam hubungan internasional, karena negara terdiri dari banyak *individu* yang membentuk kelompok-kelompok dan tiap-tiap dari mereka memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Maka suatu negara tidak dapat secara sepihak menentukan kebijakan. Oleh karena itu, negara berfungsi sebagai fasilitator dalam mengakomodir kepentingan rakyatnya dan melindungi kebebasan individu mereka. Dalam dunia internasional, liberalisme menghendaki terpeliharanya perdamaian yang dapat diwujudkan melalui kerjasama internasional dan *collective security*.

Kaum liberalis percaya bahwa dengan adanya kerjasama dan institusi internasional, maka konflik antar negara atau konflik internasional dapat diselesaikan dalam forum internasional. Adanya organisasi internasional juga dapat menjaga agar dunia tetap dalam keadaan damai. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa *Liberalisme* bertujuan untuk menciptakan *win-win solution* bagi setiap aktor yang terlibat di dalam hubungan internasional, baik negara, organisasi, maupun *individu*, karena untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan setiap aktor tersebut akan saling membutuhkan (*interdependensi*) dan saling ketergantungan tersebut diwujudkan dalam kerjasama.

Kelemahan teori *Liberalisme* karena sifatnya yang terlalu *idealis* dengan menganggap bahwa situasi dunia internasional dapat dikendalikan oleh kesepakatan negara untuk damai justru telah membuat suatu negara cenderung mengabaikan pentingnya “*power*”. Suatu negara jika terlalu terlena dengan “kebaikan” liberalisme yakni globalisasi yang memudahkan pertukaran segala aspek (nilai, barang, jasa, informasi dsb), maka negara yang cenderung lemah dan masih belum kuat sistem liberalnya akan mudah dipengaruhi oleh negara yang kuat sistem liberalnya, seperti nilai budaya yang bergeser sehingga kehilangan identitas nasionalnya, persaingan pasar yang tidak seimbang, atau bahkan dapat diintervensi sistem pemerintahannya.

Konstruktivisme

Dominasi teori *Realisme* dan *Liberalisme* kini juga mulai dipertanyakan. Karena pada dasarnya suatu negara akan bersikap “*realis*” ataupun “*idealis/liberal*” dalam hubungan internasional ditentukan oleh bagaimana negara itu memandang negara lain atau memandang situasi dalam hubungan internasional. **Weber dan Durkheim** menyatakan bahwa “**sebenarnya selama ini aktor dalam hubungan internasional tidaklah menggunakan pandangan secara objektif terhadap apa yang ada dan terjadi, melainkan secara subjektif. Intersubjektivisme menjadi landasan utama bagaimana suatu negara menentukan sikapnya dalam dunia internasional**”. Maka negara akan menganggap negara lain sebagai musuh ataupun kawan itu tergantung *intersubjektivitas* yang dianut negara tersebut. Maka *Idea and Discourse* (ide dan wacana) menjadi instrumen utama dalam teori ini.

1.2. Teori Perburuhan Internasional

Perjanjian Internasional dalam menangani perburuhan adalah International Labour Organization (ILO) adalah Organisasi Ketenagakerjaan Internasional sebagai badan khusus di PBB, beranggotakan unsur tripartit (pemerintah, pengusaha dan pekerja), bertugas antara lain menetapkan konvensi, rekomendasi dan pembinaan kerjasama teknis di bidang ketenagakerjaan.

Pengertian ILO yang di tulis **B.N Marbun** dalam Kamus Politik :

ILO singkatan dari “*International Labour Organization*” Organisasi Buruh Internasional, Badan Khusus PBB yang di bentuk dengan tujuan **untuk meningkatkan dan memperbaiki kondisi kerja, di negara-negara anggota, melakukan perbaikan standar kerja, pertukaran informasi, dan mobilisasi pendapat dunia untuk mendukung standar hidup pekerja secara lebih baik.** Yang menjadi sasaran ILO adalah “**jaminan sosial, pekerja tetap, perpindahan tenaga kerja, kesehatan tenaga kerja dan bantuan teknik bagi pembangunan ekonomi**”. ILO meliputi negara anggota dalam konferensi buruh sedunia, 48 badan eksekutif, dan diadakan tiap tahun dikantor pusat ILO, Jenewa, untuk menetapkan kebijakan umum organisasi, yang dihadiri oleh perwakilan tenaga kerja itu, badan Eksekutif bertugas untuk mengawasi kegiatan komite dan kondisi ILO. Negara anggota yang tidak menghormati dan melanggar prinsip kerja yang ditetapkan ILO akan dikenakan “daftar hitam”.

ILO di dirikan pada tahun 1919. Sasaran kegiatan ILO diarahkan pada “**terciptanya keadilan hak asasi manusia, perbaikan kondisi kehidupan dan pekerjaan serta peningkatan kesempatan kerja. Untuk itu tugas utama ILO adalah : Terciptanya perlindungan hak-hak pekerja, Memperluas lapangan pekerjaan, Meningkatkan taraf kehidupan para pekerja.**”

1.3. Teori Hak Azasi Manusia (HAM)

⁷Sejarah tentang HAM sesungguhnya dapat dikatakan hampir sama tuanya dengan keberadaan manusia di muka bumi. Mengapa dikatakan demikian, karena HAM memiliki sifat yang selalu melekat (*inherent*) pada diri setiap manusia, sehingga eksistensinya tidak dapat dipisahkan dari sejarah kehidupan umat manusia. Berbagai upaya untuk mewujudkan HAM dalam kehidupan nyata –sejak

⁷Andrey Sujatmoko, *SEJARAH, TEORI, PRINSIP DAN KONTROVERSI HAM*, Pengantar Dipresentasikan pada “Training Metode Pendekatan Pengajaran, Penelitian, Penulisan Disertasi dan Pencarian Bahan Hukum HAM bagi Dosen-dosen Hukum HAM” yang diselenggarakan oleh PUSHAM UII Yogyakarta bekerja sama dengan Norwegian Centre for Human Rights (NCHR) Universitas Oslo- Norwegia, pada tanggal 12-13 Maret 2009 di Hotel Santika Premiere, Yogyakarta.

dahulu hingga saat sekarang ini— tercermin dari perjuangan manusia dalam mempertahankan harkat dan martabatnya dari tindakan sewenang-wenang penguasa yang tiran. Timbulnya kesadaran manusia akan hak-haknya sebagai manusia merupakan salah satu faktor penting yang melatarbelakangi dan melahirkan gagasan yang kemudian dikenal sebagai HAM.

Menurut **Jerome J. Shestack**, istilah ‘HAM’ tidak ditemukan dalam agama agama tradisional. Namun demikian, ilmu tentang ketuhanan (*theology*) menghadirkan landasan bagi suatu teori HAM yang berasal dari hukum yang lebih tinggi dari pada negara dan yang sumbernya adalah Tuhan (*Supreme Being*). Tentunya, teori ini mengadaikan adanya penerimaan dari doktrin yang dilahirkan sebagai sumber dari HAM. Ada beberapa teori yang penting dan relevan dengan persoalan HAM, antara lain, yaitu: teori hak-hak kodrati (*natural rights theory*), teori *positivisme* (*positivist theory*) dan teori *relativisme* budaya (*cultural relativist theory*). Menurut teori hak-hak kodrati, HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh semua orang setiap saat dan di semua tempat oleh karena manusia dilahirkan sebagai manusia. Hak-hak tersebut termasuk hak untuk hidup, kebebasan dan harta kekayaan seperti yang diajukan oleh **John Locke**. Pengakuan tidak diperlukan bagi HAM, baik dari pemerintah atau dari suatu sistem hukum, karena HAM bersifat universal. Berdasarkan alasan ini, sumber HAM sesungguhnya semata-mata berasal dari manusia. Teori hak-hak kodrati kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai “**Bill of Rights**”, seperti yang diberlakukan oleh Parlemen Inggris (1689), Deklarasi 14 **Scott Davidson, op. cit.**, hlm. 34.

1.4. Teori Perlindungan Buruh

Pasal 88 (1) Undang - undang No. 13 Tahun 2003 disebutkan bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

1.4.1. Perlindungan upah.

Dalam **Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981** tentang **Perlindungan Upah** disebutkan bahwa “**upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau**

akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut persetujuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan, baik untuk buruh itu sendiri maupun keluarganya”.

1.4.2. Jaminan Kecelakaan Kerja.

Kecelakaan kerja merupakan kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja termasuk sakit akibat hubungan kerja, demikian pula terhadap kecelakaan kerja yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang kembali melalui jalan yang biasa/wajar dilalui. Iuran jaminan kecelakaan kerja ini sepenuhnya ditanggung oleh pengusaha yang besarnya antara 0,24-1,74% dari upah kerja sebulan. Besarnya iuran sangat tergantung dari tingkat resiko kecelakaan yang mungkin terjadi dari suatu jenis usaha tertentu, semakin besar tingkat resiko tersebut, semakin besar iuran kecelakaan kerja yang harus dibayar dan sebaliknya, semakin kecil tingkat resiko semakin kecil pula iuran yang harus dibayar.

1.4.3. Jaminan Kematian.

Kematian yang mendapatkan santunan adalah tenaga kerja yang meninggal dunia pada saat menjadi peserta Jamsostek. Jaminan ini dimaksudkan untuk turut menanggulangi meringankan beban keluarga yang ditinggalkan dengan cara pemberian santunan biaya pemakaman. Besarnya jaminan kematian ini adalah 0,30% dari upah pekerja selama sebulan yang ditanggung sepenuhnya oleh pengusaha.

1.4.4. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.

Pemeliharaan kesehatan dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja sehingga dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Program pemeliharaan kesehatan ini merupakan upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan dan atau perawatan termasuk kehamilan dan persalinan. Jaminan ini meliputi upaya peningkatan kesehatan (promotif) dan pemulihan (rehabilitatif). Iuran jaminan pemeliharaan kesehatan ini ditanggung sepenuhnya oleh pengusaha yang besarnya 6% dari upah tenaga kerja sebulan bagi tenaga kerja yang sudah berkeluarga dan

3% sebulan bagi tenaga kerja yang belum berkeluarga. Jaminan pemeliharaan kesehatan diberikan kepada tenaga kerja atau suami isteri yang sah dan anak sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.

1.5. Teori Tenaga Kerja Indonesia.

Menurut UU No. 13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa “tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”. Sedangkan menurut **DR Payaman Siamanjuntak** dalam bukunya “Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia” tenaga kerja adalah **“penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melaksanakan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga”**. Selanjutnya menurut dia **“Secara praksis pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja hanya dibedakan oleh batas umur”**.

1.6. Teori Tenaga Kerja Asing

Tenaga Kerja Asing adalah tiap orang yang bukan warga Negara Republik Indonesia yang melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau kebutuhan masyarakat. Tentang Ketenagakerjaan pengaturan yang berkaitan dengan tenaga kerja asing, diatur dalam Pasal 152 sampai dengan Pasal 157, sedangkan menurut **Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 pasal 1 angka (2)** tentang Ketenagakerjaan, menyatakan bahwa: **“Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”**, dan pasal 1 angka (13) **“Tenaga kerja asing adalah warga Negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia”**.

2. Asumsi Permasalahan

⁸Asumsi merupakan dugaan pemikiran yang dianggap benar (hanya) untuk sementara, dan asumsi tersebut bukanlah kepastian. Asumsi sering dibuat oleh

⁸ www.pemgertianmenrutparaahli,ARTI KATA & DEFINISI MENURUT PARA AHLI, 18 Desember 2015.

siapapun yang ingin mengetahui apa yang akan terjadi dengan mencarinya, menanyakan, meramalkan dan menduga-duga. Asumsi merupakan hal yang wajar dilakukan karena memang asumsi terjadi tanpa mengenal umur.

Berdasarkan dari sumber-sumber yang sudah dihimpun sebagai bahan dalam penelian ini, penulis berasumsi bahwa dalam perkembangan globalisasi dan industrialisasi untuk menghadapi perdagangan bebas yang berpotensi pada perpindahan penduduk antar lintas negara, seperti yang sedang terjadi di negara Indonesia ini, dalam persiapan pemberlakuan perdagangan bebas, pemerintah Indonesia berupaya mencari curahan investasi dari berbagai negara lain untuk menghambat perlambatan ekonomi dalam negeri.

Dalam upaya meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi serta adanya upaya meningkatkan investasi, pemerintah hendaklah tidak mengabaikan rasa ketidakadilan terhadap rakyat, atas kabar maraknya kedatangan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia, yang jumlahnya diperkirakan mencapai puluhan ribu sampai kuartal I, terutama yang berasal dari Cina. Investasi dengan prasyarat masuknya tenaga kerja asing masih bisa diterima apabila TKA yang masuk itu adalah tenaga ahli yang tidak tersedia di Indonesia sebagai mekanisme proses alih teknologi.

Negara mengemban amanah untuk menjamin semua warga negara mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan, Dalam konteks inilah secara kelembagaan, pada umumnya pemerintah suatu negara secara khusus membentuk suatu lembaga yang mengurus ketenagakerjaan. Keberpihakan pemerintah terhadap pengusaha dan mengabaikan masalah tenaga kerja lokal kerap kali terlihat dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan lain yang terkait, antara lain Permenaker no. 16 tahun 2015 yang menghapuskan syarat berbahasa Indonesia bagi TKA yang ingin bekerja di Indonesia.

1. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah pernyataan yang bersifat dugaan mengenai hubungan satu variabel atau lebih. Dengan memahami latar belakang masalah dan kerangka pemikiran di atas, maka diajukan pernyataan hipotesis: “Dalam upaya

mempercepat laju pertumbuhan ekonomi nasional menghadapi perdagangan bebas, Pemerintah Indonesia berupaya mendatangkan kucuran investasi asing dengan mempermudah izin berinvestasi di Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan, telah merubah/merevisi Undang-undang No:16/2015 dan menerbitkan Undang-undang NO: 35/2015 pada tanggal 23 Oktober 2015. Selain itu Pemerintah Indonesia juga melalui Direktorat Jendral Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM telah mengeluarkan Regulasi Baru dengan mengeluarkan pemberian Bebas Visa Kunjungan untuk 169 negara untuk 169 negara. Faktor-faktor tersebut diduga sebagai indikator penyebab meningkatnya jumlah tenaga kerja asing asal China di Indonesia dan akan berpengaruh terhadap Kondisi Buruh di Indonesia. **“Jika suatu negara memiliki daya saing yang tinggi dan mampu berkompetisi di kancah regional dan global serta keberadaan asing sebagai pendorong untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kemampuan, maka dapat dipastikan tenaga kerja yang dimiliki mampu mencapai standarisasi dan memiliki reputasi yang patut agar tenaga kerja Indonesia pun dapat bersaing dalam memperebutkan lapangan kerja di negara sendiri dan di negara lainnya di dunia Internasional”.**

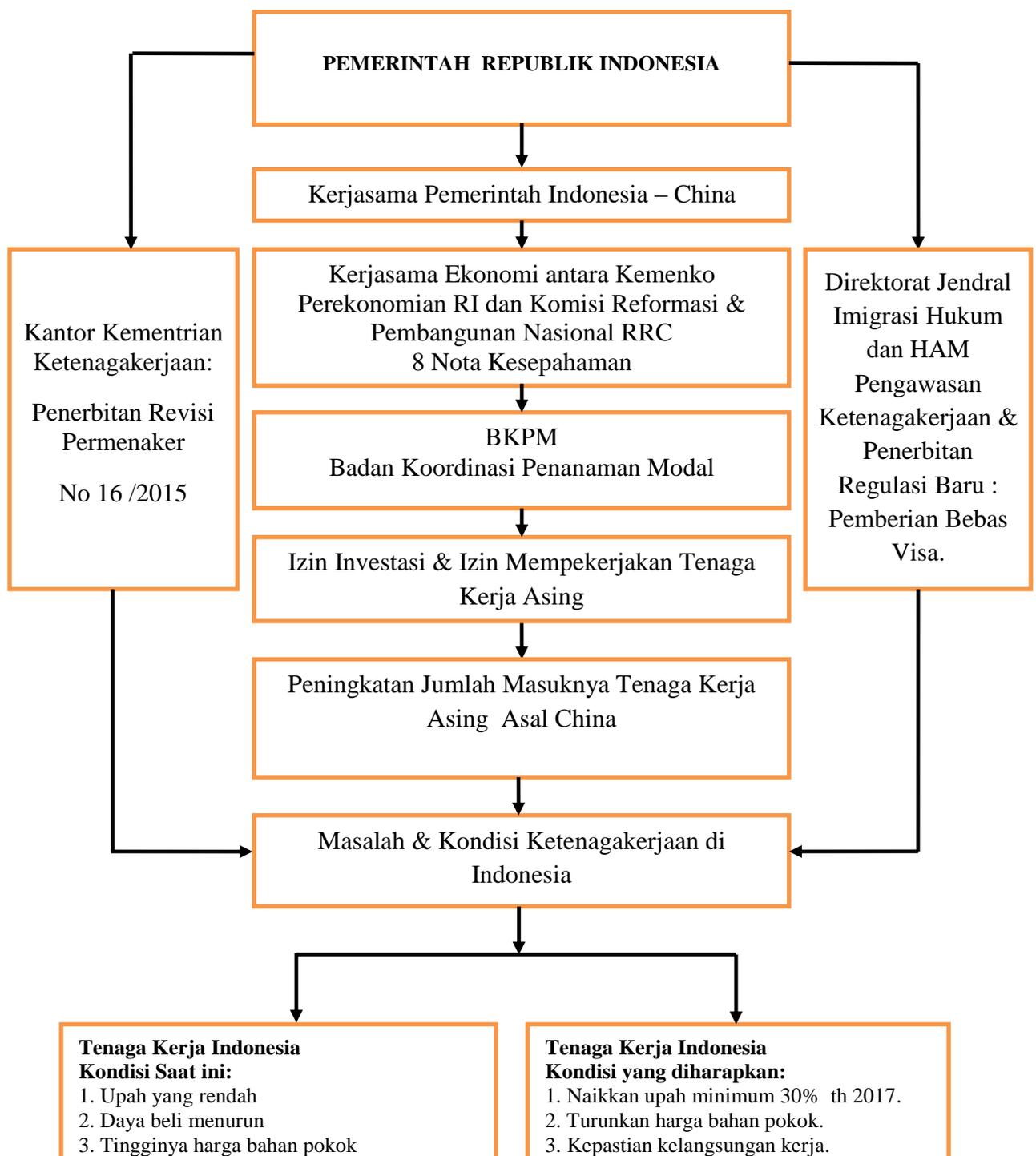
2. Operasionalisasi Variabel dan Indikator (tabel: 1)

Variabel dalam Hipotesis (Teoritik)	Indikator (Empirik)	Verifikasi (Analisis)
Variabel Bebas: Jika sebuah negara memiliki daya saing yang tinggi dan mampu berkompetisi di kancah regional dan global serta keberadaan tenaga kerja asing sebagai	1. Adanya Delapan Nota kesepahaman Indonesia-China. Kedelapan nota kesepahaman itu adalah kerjasama ekonomi antara Kemenko Perekonomian RI dan Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional RRC, kerjasama Proyek Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung antara Kementerian BUMN dan Komisi	1. http://www.kompasiana.com/lahagu/implikasi-kerjasama-cina-indonesia-masuknya-ribuan-pekerja-cina-di-banten-dan-

<p>pendorong untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kemampuan</p>	<p>Reformasi dan Pembangunan Nasional RRC, kerjasama maritim dan SAR antara Basarnas dan Kementerian Transportasi RRC, Protokol Persetujuan antara Pemerintah RRC dan RI dalam pencegahan pengenaan pajak ganda kedua negara, Kerja Sama Antariksa 2015-2020 antara LAPAN dan Lembaga Antariksa RRT, kerjasama saling dukung antara Kementerian BUMN dan Bank Pembangunan China Pembangunan, kerjasama antara pemerintah RRC dan RI dalam pencegahan pengenaan pajak ganda kedua negara dan kerja sama bidang industri dan infrastruktur antara Kementerian BUMN dan Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional RRC.</p> <p>2. Adanya lonjakan nilai investasi dari China pada kuartal I-2015 mencapai US\$500 juta atau setara Rp 6,5 triliun dengan asumsi kurs rupiah Rp13.000 per dolar AS. Nilai tersebut melonjak lima kali lipat dari realisasi pada kuartal I-2014 yang hanya US\$100 juta.</p>	<p>papua_559792ba_d67e619d07b176_dc</p> <p>2. Data BKPM http://www.bareksa.com/id/text/2016/04/26/investasi-china-di-indonesia-naik-400-apa-penyebabnya/13195/news News – Economy umat, 15 Juli 2016, 16:35 WIB Tenaga Kerja Cina Marak, Indonesia Terancam Masalah Sosial Rep: Reja Irfa Widodo/ Red: Ilham</p>
---	--	---

<p>Variabel Terikat : Maka, dapat dipastikan tenaga kerja yang dimiliki telah mampu mencapai standarisasi dan memiliki reputasi yang patut agar tenaga kerja Indonesia pun dapat bersaing dalam memperebutkan lapangan pekerjaan di negara sendiri dan negara lainnya di dunia Internasional..</p>	<p>3. Temuan ribuan buruh kasar asal China bekerja di berbagai proyek berskala besar :</p> <p>4. Adanya proyek pembangunan PLTU Labuhan Angin di Desa Labuhan Angin Kota Sibolga Sumatera Utara sebesar 208.7 juta dolar AS Pelaksana oleh CHINA NATIONAL MACHINERY & EQUIPMENT IMPORT & EXPORT CORPORATION (CMEC) sebuah BUMN China.</p> <p>5. Adanya Proyek PLTU Celukan Bawang Bali, di Buleleng Bali, yang dikerjakan 4 kontraktor : China Huadian Power Plant, China Huadian Engineering CO. Ltd, PT CR 17 dan mitra lokal PT General Energy Bali, bernilai investasi Rp 9 triliun.</p> <p>6. Adanya proyek pembangunan PLTU Palabuhanratu-Sukabumi</p>	<p>3. http://poskotanews.com/2016/07/17/buruh-china-serbu-sejumlah-proyek-di-indonesia/ Buruh China Serbu Sejumlah Proyek di Indonesia Minggu, 17 Juli 2016 — 11:39 WIB</p>
--	--	---

3. Skema Kerangka Teoritis



E. Metode Tehnik dan Pengumpulan Data.

1. Tingkat Analisis

Ada tiga kelompok antara unit analisa dan unit eksplanasi, yaitu analisa reduksionis, analisa korelasionis, dan analisa induksionis. Dalam penelitian ini tingkat analisis yang digunakan adalah analisa *Korelasionis* dimana unit eksplanasi dan unit analisisnya pada tingkatan yang sama, yaitu masuknya tenaga kerja asing di Indonesia akan berpengaruh terhadap kesempatan dan kondisi tenaga kerja lokal di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode penelitian *deskriptif* - kualitatif. Maksud dari metode ini adalah metode yang berusaha mengumpulkan, menyusun, dan menginterpretasikan data yang kemudian diajukan dengan menganalisa suatu fenomena serta suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, dan suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Pengumpulan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasi masalah yang sedang berlangsung akibat yang terjadi. Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis data yang telah terkumpul melalui referensi buku yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dengan tepat mengenai masuknya tenaga kerja asing di Indonesia serta pengaruhnya terhadap buruh lokal.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*Library Research*), yang mana studi kepustakaan itu sendiri adalah mencari referensi-referensi buku atau literatur sebanyak-banyaknya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, seperti buku-buku, majalah, artikel, surat kabar, laporan lembaga pemerintah maupun non-pemerintah, dan data-data yang terdapat dalam website atau internet, yang dapat menunjang pembahasan penelitian.

F. LOKASI DAN LAMA PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Untuk menunjang data yang dibutuhkan dalam menyusun penelitian ini, penulis mengunjungi beberapa tempat untuk memperoleh data serta informasi yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Perpustakaan FISIP Universitas Pasundan Bandung Jl. Lengkong Dalam 11 No. 17D Bandung.
2. Berita dan liputan media lokal.
3. ASEAN Economic Community.
4. Telusur melalui media internet.

2. Lama Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu enam bulan.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan hal-hal yang berisi latar belakang penelitian, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan hipotesis, metode penelitian dan teknik pengumpulan data, lokasi penelitian, jadwal dan kegiatan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: OBJEK PENELITIAN VARIABEL BEBAS

Bab ini berisikan uraian atau informasi umum atau dasar mengenai tema atau masalah yang dijadikan variabel bebas. Disini penulis menjelaskan secara umum tentang Filosofi dan Tenaga Kerja Asing (TKA), sebagai kebijakan dan implementasi kerjasama ekonomi Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Rakyat China .

BAB III: OBJEK PENELITIAN VARIABEL TERKAIT

Bab ini berisikan uraian masalah yang dijadikan variabel terikat. Dalam bab ini penulis menjelaskan masalah dan kondisi ketenagakerjaan Indonesia, upah, pangan, kesehatan dan pendidikan anak.

BAB IV: VERIVIKASI DATA

Bab ini berisikan uraian data yang menjawab indicator variabel bebas dan variabel terkait. Adapun isi dari bab ini adalah bagaimana dampak dari masuknya tenaga kerja dan investasi asing di Indonesia terhadap kondisi buruh/ tenaga kerja Indonesia.

BAB V: KESIMPULAN

Bab ini adalah bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan hasil dari analisis penelitian yang menunjukkan hubungan antara perumusan masalah dengan hipotesa serta kerangka dasar teori sebagai salah satu landasan dan kata penutup serta saran.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Teori berasal dari bahasa Yunani, yang artinya “melihat” atau “memahami”. Mas’oed, M. Ilmu Hubungan Internasional. Disiplin dan Metodologi (LP3ES), hal. 185
- [2] Dijelaskan dalam Bahan Kuliah Mata Kuliah Teori Hubungan Internasional I oleh dosen Himawan Bayu P., M.A, Ph.D
- [3] Ibid, hal. 201-202
- [4] Paradigma adalah pandangan dunia (*world view*) yang memuat kesamaan asumsi dasar tentang suatu bidang studi, termasuk kesepakatan tentang kerangka konseptual, petunjuk *metodologis* dan teknik analisis. Paradigma berfungsi sebagai penuntun dalam menentukan prioritas masalah untuk diteliti dan menunjukkan cara bagaimana masalah tersebut harus diteliti. (Disampaikan dalam kuliah Teori Hubungan Internasional I oleh Dosen Himawan Bayu P., M.A, Ph.D)
- [5] Ibid, hal 18-19
- [6] Disampaikan dalam kuliah *Political Science* oleh Dr. Zaini, pada 19 September 2012
- [7] Tandirerung, S. Teori Hubungan Internasional. *Liberalisme* dan *Neo-Liberaalisme*. [Artikel Online. [http : http://sartika-t-fisip10.web.unair.ac.id/artikel_detail-59668%5D](http://sartika-t-fisip10.web.unair.ac.id/artikel_detail-59668%5D)
- [8] Khoiriyah, S. Teori Hubungan Internasional – Konstruktivisme. [Artikel Online : http://siti-k-fisip11.web.unair.ac.id/artikel_detail%5D